

**LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2024-2026**



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL  
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dibuat sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah salah satu faktor penting yang sangat menentukan suatu kebijaksanaan pelaksanaan program pemerintah yang akan memperjelas arah dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Kedinasan, sehingga mempermudah menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dan sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah ditentukan dalam 3 ( tiga ) tahun kedepan.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini dapat memberikan manfaat, masukan serta pertimbangan untuk mengambil kebijakan.

Karanganyar, April 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR

**Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penulisan .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	2
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>5</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	5
2.1.1. Tugas dan Fungsi .....	5
2.1.2. Struktur Organisasi .....	8
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah .....	9
2.2.1. Kepegawaian .....	9
2.2.2. Sarana Prasarana .....	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.3.1. Kondisi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial .....	13
2.3.2. Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial .....	15
2.3.3. Kondisi Umum Bantuan dan Jaminan Sosial .....	17
2.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	19
2.4.1. Tantangan .....	19
2.4.2. Peluang .....	20
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	<b>21</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah .....	21
3.2. Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	25
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>26</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	26
4.1.1. Tujuan .....	27
4.1.2. Sasaran .....	27
4.2. Pohon Kinerja (Cascading) Tujuan dan Sasaran .....	28
4.2.1. Pohon Kinerja Daerah .....	28
4.2.2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah .....	30
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>32</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>35</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN</b> .....	<b>43</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
8.1. Pedoman Transisi .....	46
8.2. Kaidah Pelaksanaan .....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai .....	9
Tabel 2.2	Daftar Jabatan Struktural, Fungsional, Staf dan Non ASN .....	9
Tabel 2.3	Daftar Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai .....	10
Tabel 2.4	Daftar Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai .....	10
Tabel 2.5	Daftar Pegawai berdasarkan Sebaran Pegawai .....	10
Tabel 2.6	Ketersediaan Prasarana Gedung Kantor.....	11
Tabel 2.7	Ketersediaan Sarana Perlengkapan .....	11
Tabel 2.8	Ketersediaan Kendaraan Dinas .....	12
Tabel 2.9	Ketersediaan Peralatan Kantor .....	13
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial .....	18
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan .....	22
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah Pada RPD .....	26
Tabel 4.2	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Program OPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 .....	29
Tabel 4.3	Keselarasan Tujuan dan Sasaran OPD dengan RPD .....	30
Tabel 4.4	Keselarasan Sasaran RPD, Tujuan, dan Sasaran OPD Program	31
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	33
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	37
Tabel 7.1	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD.....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial .....	8
---	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dengan visi ” **Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar**” akan berakhir masa berlakunya di tahun 2023, telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar berakhir pada tahun 2023 sehingga Daerah memerlukan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai penggantinya. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD kabupaten Tahun 2024-2026. Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Perangkat Daerah juga wajib Menyusun Renstra Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, potensi dan kewenangan yang dimiliki, kemampuan pendanaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas Renstra Dinas Sosial disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran daerah, indikator dan target kinerja daerah, serta kemampuan dana daerah.

Renstra akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan. Setelah melaksanakan kegiatan maka sebagai Perangkat Daerah setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Dasar Hukum Penulisan**

Landasan Yuridis Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Periode 2014-2026 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) baik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Memberikan pedoman bagi perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar yang mengarah kepada Tujuan, Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar selama 3 (tiga) tahun.
3. Sebagai tolok ukur dan penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang yang menjelaskan alasan penyusunan, dasar hukum yang terkait dengan renstra, maksud dan tujuan penulisan renstra serta sistematika penulisan dari Bab I sampai Bab VIII, yang masing-masing terinci dalam subbab.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR**

memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar ini.

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR**

Menguraikan permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelayanan Perangkat Daerah, tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang didasarkan pada data dan informasi yang diuraikan dalam Bab II. Permasalahan-permasalahan dipilih dan dirumuskan menjadi isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, dalam kurun waktu perencanaan.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Menguraikan tujuan dan sasaran Baperlitbang sebagai perangkat daerah yang mendukung tercapainya sasaran daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pusat sesuai kewenangan yang ditangani Baperlitbang. Perumusan tujuan dan sasaran, program dan

kegiatan yang disertai dengan ukuran (indikator) dan target yang ditetapkan.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah.

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK)

**BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas kaidah pelaksanaan dan pedoman penggunaannya di masa transisi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

**2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dapat dikemukakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai unit kerja yang dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap perkembangan sosial, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat (*Bottom-up*) dan arah Kebijakan dari atas (*Top-Down*) secara selaras, serasi dan seimbang. Karena itu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan bagi penyiapan rencana dan penerapan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Karanganyar.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang Pelayanan Teknis yang mempunyai uraian tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesejahteraan sosial;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SEKRETARIAT

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengkoordinasian tatalaksana;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan Barang/Jasa;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN SOSIAL

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pembinaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan perencanaan pemberdayaan dan pembinaan sosial;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan sosial;
- c. Pengelolaan bantuan sosial;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan sosial, dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan perencanaan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan penyantunan anak dan keluarga;
- b. Pengelolaan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan penyantunan anak dan keluarga;
- c. Penanganan permasalahan sosial;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan rehabilitasi sosial, dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Subbagian dan/atau Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Fungsional.

#### 6. UPTD

- a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Dinas Sosial dapat dibentuk UPTD.
- b. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

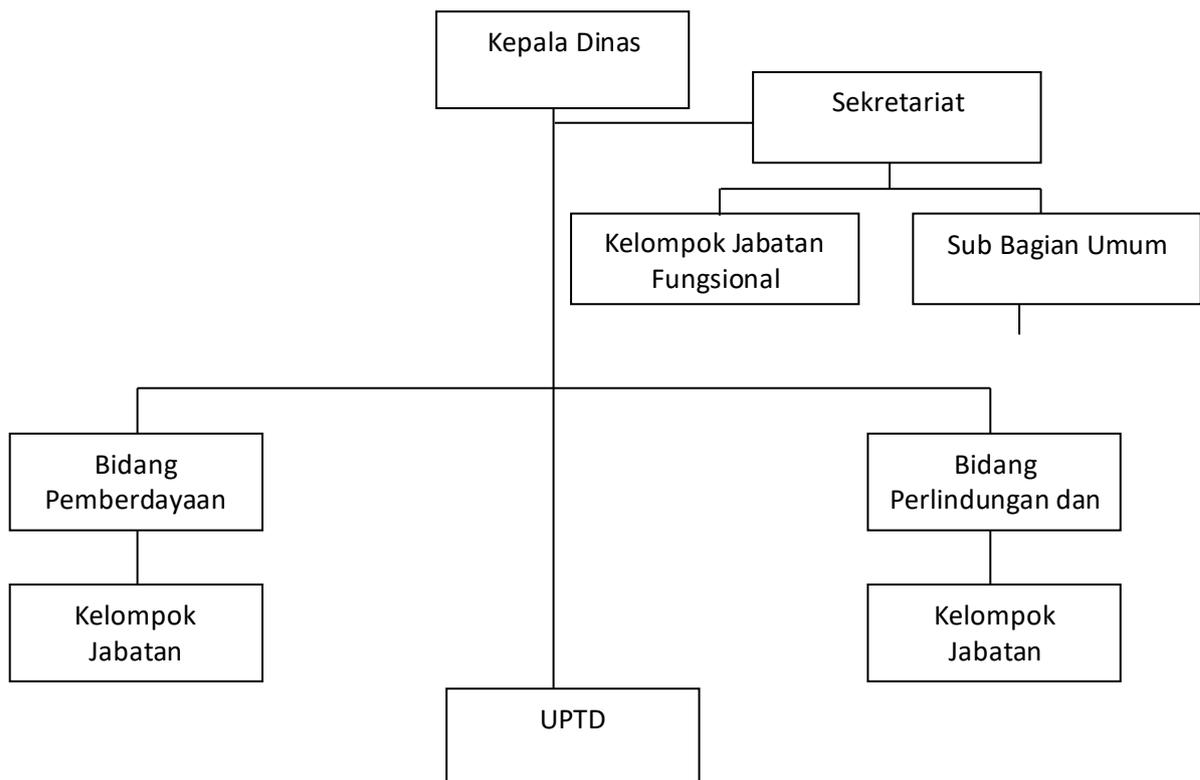
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan YPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### 2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Susunan Pejabat Struktural Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Umum
  - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial
  - a. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda
  - b. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
  - a. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda
  - b. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPTD.



**Gambar 2.1**

Bagan Struktur Organisasi

## 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

### 2.2.1 Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya manusia sebanyak 60 (enam puluh) orang Pegawai, terdiri dari 24 (dua puluh empat) Pegawai Negeri Sipil dan 36 (tiga puluh enam) Tenaga Kontrak. Kondisi kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

#### 1. Jumlah Pegawai

**Tabel 2.1.**

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai

No	Uraian	2020	2021	2022
1.	PNS	33	27	24
2.	Non PNS	20	26	32
	<b>Jumlah.</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>56</b>

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2022, diolah

#### 2. Jabatan Struktural, Fungsional, Staf dan Non ASN

**Tabel 2.2.**

Daftar Jabatan Struktural dan Fungsional, Staf, Non ASN

No	Uraian	2020	2021	2022
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretaris	1	1	1
3.	Kabid	2	2	2
4.	Kasubbag	2	2	1
5.	Kasubbid/Kasi	6	5	-
6.	Jabatan Fungsional	1	1	5
7.	Staf	20	16	14
8.	Non ASN	20	26	32
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>56</b>

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2022, diolah

### 3. Tingkat Pendidikan Pegawai

**Tabel 2.3.**

Tingkat Pendidikan Pegawai (ASN dan Non ASN)

No	Uraian	2020	2021	2022
1.	S-2 (Magister)	8	5	6
2.	S-1 / D-4 (Sarjana)	19	19	21
3.	D-3 Akademi	2	4	5
4.	SMU / SMK / MA	22	22	15
5.	SMP / MTS	1	2	2
6.	SD	1	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>56</b>

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2022, diolah

### 4. Jenis Kelamin Pegawai

**Tabel 2.4.**

Jenis Kelamin Pegawai (ASN dan Non ASN)

No	Uraian	2020	2021	2022
1.	Laki - Laki	33	33	35
2.	Perempuan	20	20	21
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>56</b>

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2022, diolah

### 5. Sebaran Pegawai

**Tabel 2.5.**

Sebaran Pegawai

No	Uraian	2020	2021	2022
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretariat	15	29	29
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial	16	14	15
4.	Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	11	10	11
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>56</b>

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2022, diolah

#### 2.2.2 Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi hasil kinerja dari perangkat daerah. Ketersediaan dilihat dari jumlah dan kondisi sarpras yang tersedia, mencukupi dan layak digunakan tidak untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

## 1. Prasarana Gedung Kantor

Menguraikan ketersediaan prasarana gedung dan perlengkapannya yang digunakan, sebagai berikut :

**Tabel 2.6.**

### Ketersediaan Prasarana Gedung Kantor

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022
1.	Ruang Kerja / Bidang / Sekt	Unit	10	10	10
2.	Ruang Rapat	Unit	2	2	2
3.	Ruang Perpustakaan	Unit	1	1	1
4.	Lobby (Front Office)	Unit	1	1	1
5.	Tempat Parkir	Unit	2	2	2
6.	Ruang Kearsip	Unit	1	1	1
7.	Halaman	Unit	1	1	1
8.	Gudang	Unit	3	3	3
9.	Ruang Disabilitas	Unit	1	1	1
10.	Mushola	Unit	1	1	1
11.	Kamar Mandi	Unit	15	15	15
12.	Kamar Singgah PGOT	Unit	1	1	1
13.	Ruang TAGANA	Unit	1	1	1

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2022, diolah*

## 2. Sarana Gedung Kantor

Menguraikan ketersediaan sarana gedung dan perlengkapannya yang digunakan sebagai berikut :

**Tabel 2.7.**

### Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022
1.	Lemari Besi/Metal	Unit	7	7	7
2.	Lemari Kayu	Unit	4	4	4
3.	Rak Besi	Unit	1	1	1
4.	Rak Kayu	Unit	1	1	1
5.	Filling Cabinet Besi	Unit	15	15	15
6.	Brandkas	Unit	1	1	1
7.	White Board	Unit	8	8	8
8.	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	1	1
9.	Display	Unit	3	3	3
10.	Alat Semprot Manual	Unit	1	1	1
11.	Meja Kerja Kayu	Unit	6	6	6
12.	Kursi Besi/Metal	Unit	195	195	195
13.	Kursi Kayu	Unit	3	3	3
14.	Meja Rapat	Unit	40	40	40
15.	Meja Telepon	Unit	1	1	1
16.	Meja Resepsionis	set	1	1	1
17.	Meja ½ Biro	Unit	46	46	46
18.	Kursi Fiber Glas/Plastik	Unit	7	7	7

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022
19.	Kursi Rapat	Unit	1	1	1
20.	Kursi Tamu	set	5	5	5
21.	Kursi Putar	Unit	2	2	2
22.	Kursi Biasa	Unit	1	1	1
23.	Kursi Lipat	Unit	6	6	6
24.	Meja Komputer	Unit	2	2	2
25.	Meubeleur Lainnya	Unit	1	1	1
26.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	1	1	1
27.	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	1	1
28.	Lemari Es	Unit	2	2	2
29.	A.C Window	Unit	30	30	30
30.	A.C Split	Unit	2	2	2
31.	Kipas Angin	Unit	9	9	9
32.	Televisi	Unit	5	5	5
33.	Tangga Aluminium	Unit	2	2	2
34.	Kaca Hias	Unit	1	1	1
35.	Dispenser	Unit	3	3	3
36.	Mimbar/Podium	Unit	1	1	1
37.	Gordyn/Kray	set	1	1	1
38.	Meja Kerja Pejabat Eselon	buah	5	5	5
39.	Meja Tamu Biasa	buah	1	1	1
40.	Kursi Kerja Pejabat	buah	10	10	10
41.	Lemari Buku Arsip	buah	0	0	2

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2022, diolah

Ada kebutuhan yang perlu untuk dicukupi diantara adalah : rak buku untuk perpustakaan, rak berkas untuk gudang, penataan dan penambahan gudang. Secara umum kebutuhan perlengkapan ruangan sudah mencukupi dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keperluan lebih banyak pada perawatan dan pemeliharaan sehingga siap untuk digunakan.

### 3. Kendaraan Dinas

Kendaraan sebagai sarana mobilitas pegawai sangat diperlukan, baik untuk tugas secara perorangan maupun bersama. Kendaraan yang tersedia berupa mobil dan sepeda motor, jumlahnya sebagai berikut :

**Tabel 2.8.**

Ketersediaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022
1.					
2.	Mobil	unit	6	6	6
3.	Sepeda motor	unit	56	56	56
	Jumlah	unit	62	62	62

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2022, diolah

#### 4. Peralatan

Peralatan sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan, dalam uraian ini hanya beberapa peralatan yang sering digunakan dalam pekerjaan yang diuraikan, yaitu :

**Tabel 2.9.**

Ketersediaan Peralatan Kantor

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022
1.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inc)	Unit	3	3	3
2.	Mesin Fotocopy Folio	Unit	1	1	1
3.	Loudspeaker	Unit	1	1	1
4.	Sound System	Unit	4	4	4
5.	Wireless	Unit	2	2	2
6.	Stabilisator	Unit	2	2	2
7.	Camera Video	Unit	1	1	1
8.	Handy Cam	Unit	1	1	1
9.	Kabel Mic	Set	1	1	1
10.	CCTV dan Monitor	Set	1	1	1
11.	Compact Disk Player	Unit	1	1	1
12.	Camera Electronic	Unit	1	1	1
13.	Layar Film/Projector	Unit	18	18	18
14.	Televisi	Unit	1	1	1
15.	Telephone (PABX)	Unit	2	2	2
16.	Telephone Mobile	Unit	4	4	4
17.	Handy Talky (HT)	Unit	8	8	8
18.	Facsimile	Unit	2	2	2
19.	P.C Unit	Unit	16	16	16
20.	Laptop	Unit	25	25	25
21.	Note Book	Unit	29	29	29
22.	Floppy Disk Unit	Unit	1	1	1
23.	CPU	Unit	1	1	1
24.	Monitor	Unit	1	1	1
25.	Printer	Unit	22	22	22
26.	Scanner	Unit	1	1	1
27.	External	Unit	1	1	1

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2022, diolah*

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Berikut ini adalah gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar :

#### 2.3.1 Kondisi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara

wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masuk ke dalam kategori:

a) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial melalui penyelenggaraan penyantunan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga.

Pelayanan sosial anak meliputi : balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus).

b) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dilaksanakan Dinas Sosial melalui penyelenggaraan penyantunan serta berbagai program dan kegiatan yang terus dikembangkan dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong lanjut usia dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin di dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya para lansia.

c) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diselenggarakan untuk :

- (1) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial;
- (2) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi guna pengembangan usaha

ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan;

- (3) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan (cacat berat) sesuai kriteria melalui sistem jaminan sosial;
  - (4) Meningkatkan aksesibilitas fisik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya;
  - (5) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang cacat.
- d) Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

Upaya Dinas Sosial dalam rangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah berupa kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila, gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan. Sebagian keluaran (*output*) hasil penanganan kelompok sasaran pelayanan telah berhasil memanfaatkan bantuan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tuna sosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna sosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tuna sosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain.

### **2.3.2 Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial**

Pemberdayaan Sosial diselenggarakan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan sosial juga diselenggarakan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu/kelompok dapat digali dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah :

a) Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin

Sasaran kegiatan program pemberdayaan fakir miskin adalah : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/pertanian, perkotaan, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahterannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam/sosial, terkena PHK, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga.

Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin berupa : Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

b) Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Melalui pemberdayaan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat di antaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.

Kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat

berupa:

- (1) Pemantapan Program Pemberdayaan Karang Taruna, Orsos dan PSM;
- (2) Orientasi / Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM berprestasi;
- (3) Bantuan Stimulan Untuk Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM;
- (4) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial;
- (5) Penguatan Jaringan Kerja Orsos Melalui UEP;
- (6) Pertemuan Jaringan kerja FKPSM tingkat Kabupaten;
- (7) Pemantapan Pelaksana WKSBM.

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda.

Kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial berupa:

- (1) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas);
- (2) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/TMB.

### **2.3.3 Kondisi Umum Bantuan dan Jaminan Sosial**

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya berupa :

- a) Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Secara geografis Kabupaten Karanganyar memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Setiap tahun berbagai jenis bencana seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian dalam jumlah tidak sedikit.

Adapun langkah yang ditempuh yaitu dengan membangun

sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah melalui kegiatan :

- (1) Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);
- (2) Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik;
- (3) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam. Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam.

Tabel 2.10.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Karanganyar 2020-2022

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022
1	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0,50		
2	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi	%	100,00	100,00	100,00

	kebutuhan dasarnya di luar panti				
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100,00	100,00	100,00
8	Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial	%	100,00	100,00	100,00
9	Meningkatnya pelayanan terhadap anakyang mengalami masalah kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00	100,00
10	Persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial	%	100,00	100,00	100,00

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Tahun 2020*

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PPKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak.

Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kabupaten Karanganyar jumlahnya cukup besar.

### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, meliputi :

1. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan pelaksana yang ada di dalam struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
2. Munculnya dinamika sosial di masyarakat menambah beragam permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi prioritas tersendiri bagi bidang sosial khususnya dalam mengatasinya;
3. Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil;
4. Rendahnya partisipasi sosial masyarakat.

### **2.4.2. Peluang**

Peluang merupakan situasi yang menguntungkan dalam pembangunan. Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik;
2. Terbitnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan angin segar bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang-Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.
3. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan intern Dinas Sosial diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang lebih integratif.
4. Dukungan infrastruktur PSM, Karang Taruna, Orsos, Relawan Sosial, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat.
5. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial di luar Panti Sosial.
6. Kerjasama stakeholders baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PPKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.
7. Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar**

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah. Selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai kepentingan di Kabupaten Karanganyar telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Disadari bahwa tantangan ke depan semakin berat, seiring dengan kompleksitas dan kuantitas PPKS juga turut meningkat sejalan perkembangan dan perubahan kondisi sosial masyarakat.

Selain itu penanganan PPKS, jika tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang makin meluas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta

dapat mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, secara umum masih bisa dikatakan kurang mencukupi. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada sisi lain permasalahan ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PPKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingginya Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PPKS dan keterpaduan penanganan PPKS antar pemerintahan dan antar sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan sosial dasar PPKS di luar panti belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).</li> <li>- Tingginya mobilitas PPKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PPKS Jalanan.</li> <li>- PPKS non produktif dan terlantar dan korban bencana masih</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar.</p> <p>- Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan PPKS khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun Stakeholders belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PPKS melalui <i>Cooperate Social Responsibility</i> (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.</p>
2.	Belum optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha	Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	<p>- PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas belum maksimal dalam mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).</p> <p>- Belum optimalnya</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kesejahteraan Sosial (UKS).		<p>kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.</p> <p>- Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan penanganan PPKS.</p>
3.	Masih terdapat <i>inclusion error</i> dan <i>exclusion error</i> dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PPKS lainnya.	Pelaksanaan verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditingkat Kecamatan dan Desa belum berjalan optimal.

Dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara

berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

### **3.2 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yaitu dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial antara lain :

- a. Belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar PPKS dan keterpaduan penanganan PPKS antar pemerintahan dan antar sektor;
- b. Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PPKS lainnya;
- c. Masih kurang optimalnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berkomitmen untuk menurunkan angka PPKS melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menurunkan angka PPKS tersebut adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang utamanya difokuskan pada sasaran rumah tangga sangat miskin (RTSM).

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatkan Daya Saing Daerah”**. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

**Tabel 4.1.**

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah Pada  
RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatkan tata	Indeks

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
		pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi
		Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, 2023

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran daerah akan tercapai jika tujuan dan sasaran startegis perangkat daerah tercapai. Sasaran daerah, dapat satu atau lebih harus menjadi dasar perangkat daerah untuk menentukan tujuan strategisnya.

##### 4.1.1. Tujuan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial di urusan sosial, maka mengambil sasaran daerah Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial. Rumusan tujuan Dinas Sosial tahun 2024 -2026 adalah Meningkatnya Perlindungan Sosial.

Keberhasilan peningkatan atau meningkatnya perlindungan sosial akan diukur dengan Menurunnya angka kemiskinan dan banyaknya pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Dinas Sosial.

##### 4.1.2. Sasaran

Dalam mencapai tujuan strategis OPD, maka ditetapkan sasaran – sasaran yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan juga gambaran umum OPD (potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis yang harus diatasi). Sasara Dinas Sosial Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
- 2) Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesjahteraan Sosial (PPKS)

Penjelasan rumusan sasaran :

##### 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Adalah upaya Dinas Sosial untuk selalu menjadi Perangkat Daerah yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Kinerja OPD adalah kinerja Dinas Sosial yang akuntabel dalam mengelola anggaran, melayani perangkat daerah / masyarakat, akuntabel dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja perangkat daerah.

## **2) Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Dinas Sosial berupaya untuk meningkatkan pelayanan untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tepat sasaran, sehingga Dinas Sosial dapat berperan serta pada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.

### **4.2. Pohon Kinerja (Cascading) Tujuan dan Sasaran**

Pelaksanaan subkegiatan, kegiatan dan program semua Perangkat Daerah muaranya adalah tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu semua rencana kerja perangkat daerah harus mengacu / mendasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dengan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) adalah terletak pada sasaran dan program prioritas daerah. Sasaran daerah harus menjadi tujuan utama atau dasar penentuan tujuan daerah dan dilaksanakan dengan program-program yang sama (sesuai RPD). Secara singkat dapat digambarkan sebagai flowchart berikut :



#### **4.2.1. Pohon Kinerja Daerah**

Pohon kinerja daerah digambarkan dengan keterkaitan / pengaruh / akibat dari dilaksanakannya program yang tepat sasaran. Memang tidak semua program terkait langsung dengan sasaran daerah, sehingga ada program prioritas atau strategis dan program-program pendukung. Secara singkat pohon kinerja digambarkan dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel 4.2.**

Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Program OPD  
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

<b>Tujuan RPD</b>	<b>Sasaran RPD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS / STRATEGIS OPD</b>
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Penanganan Bencana 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	
	Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	

Sumber : Dinas Sosial, 2023

#### 4.2.2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Pohon kinerja perangkat daerah menggambarkan bagaimana tujuan OPD dicapai melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Tidak semua kegiatan dan subkegiatan berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran OPD, sehingga dalam sebagaimana disampaikan tabel berikut.

**Tabel 4.3.**

Keselarasan Tujuan dan Sasaran OPD dengan RPD  
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

<b>Tujuan RPD</b>	<b>Sasaran RPD</b>	<b>TUJUAN OPD</b>	<b>Indikator</b>
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	1. Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesjahteraan Sosial (PPKS)
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan		
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1. Nilai SAKIP
	Sasaran 5		

<b>Tujuan RPD</b>	<b>Sasaran RPD</b>	<b>TUJUAN OPD</b>	<b>Indikator</b>
	Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan		

Sumber : Dinas Sosial, 2023

**Tabel 4.4.**

Keselarasan Sasaran RPD, Tujuan dan Sasaran OPD dan Program

<b>Sasaran RPD</b>	<b>Tujuan OPD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Program</b>
Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Meningkatkan perlindungan sosial	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Sumber : Dinas Sosial, 2023

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah maka diperlukan strategi-strategi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan. Dengan adanya beberapa sasaran tentunya membutuhkan lebih banyak strategi untuk setiap sasaran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa strategi yang satu dapat mendukung 2 sasaran yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Daerah : Meningkatkan Daya Saing Daerah			
Sasaran Daerah : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan	Meningkatkan perlindungan sosial	- Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan keluarga dan	- Peningkatan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial .  - Peningkatan pembinaan dan

Tujuan Daerah : Meningkatkan Daya Saing Daerah			
Sasaran Daerah : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
sosial		<p>kesejahteraan sosial serta terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.</p> <p>- Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam mengatasi ketidakberdayaan dan kesenjangan sosial serta sebagai kekuatan dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh PPKS.</p> <p>- Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p>	<p>keterampilan bagi PPKS.</p> <p>- Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberian bantuan sosial bagi PPKS.</p> <p>- Penguatan kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PPKS.</p> <p>- Peningkatan fungsi dan pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>- Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran.</p> <p>- Peningkatan kualitas perencanaan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan SPM.</p> <p>- Peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur yang professional.</p> <p>- Peningkatan</p>

Tujuan Daerah : Meningkatkan Daya Saing Daerah			
Sasaran Daerah : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial.</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</li> <li>- Meningkatkan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</li> </ul>	<p>kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur yang handal dalam pengembangan sistem dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.</p>

Sumber : Dinas Sosial, 2023

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah maka diperlukan strategi-strategi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan. Dengan adanya beberapa sasaran tentunya membutuhkan lebih banyak strategi untuk setiap sasaran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa strategi yang satu dapat mendukung 2 sasaran yang berbeda.

Secara kerangka piker (input-output, sebab akibat) berdasarkan tujuan, sasaran Daerah dan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berikut :

Tujuan Daerah : Meningkatkan Daya Saing Daerah

Sasaran Daerah : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial;

Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Tujuan OPD : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial;

Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Sasaran OPD :

- 1) Meningkatkan perlindungan sosial
- 2) Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintah

Strategi OPD :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan keluarga dan kesejahteraan sosial serta terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam mengatasi ketidakberdayaan dan kesenjangan sosial serta sebagai kekuatan dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh PPKS.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 6) Meningkatkan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

maka Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, secara singkat sebagaimana table berikut :

Tabel 6.1

## Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1					Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
				1	06				Urusan Pemerintah Bidang Sosial			11.805.000.000	12.047.750.000	12.478.812.500			36.331.562.500					
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks reformasi birokrasi																					
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintah	Nilai SAKIP							%	81	4.550.000.000	82	4.677.500.000	83	4.771.050.000	83	13.998.550.000	DINSOS	DINSOS		
				1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD, kali 100%	%	100	4.550.000.000	100	4.677.500.000	100	4.771.050.000	100	13.998.550.000		
				1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disusun Selama 1 Tahun	%	100	36.000.000	100	47.000.000	100	50.000.000	100	133.000.000		
				1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		dokumen	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	18	30.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		laporan	3	26.000.000	3	27.000.000	3	30.000.000	9	83.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah		laporan	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3.180.000.000	100	3.180.000.000	100	3.212.050.000	100	9.572.050.000		

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Orang / bulan	21	3.180.000.000	21	3.180.000.000	21	3.212.050.000	63	9.572.050.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	10.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	70.000.000		
				1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		paket	2	10.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	6	70.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	450.000.000	100	507.000.000	100	544.000.000	100	1.501.000.000		
				1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	60.000.000	1	140.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		paket	1	10.000.000	1	20.000.000	1	35.000.000	1	65.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		paket	1	2.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	62.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		laporan	12	35.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	135.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		laporan	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	36	1.050.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		dokumen	5	3.000.000	5	7.000.000	5	9.000.000	5	19.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Tersedia	%	100	50.000.000	100	68.500.000	100	70.000.000	100	188.500.000		
				1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		unit	2	20.000.000	3	30.000.000	2	20.000.000	7	70.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		unit	3	30.000.000	3	38.500.000	3	50.000.000	9	118.500.000	DINSOS	DINSOS

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	524.000.000	100	545.000.000	100	565.000.000	100	1.634.000.000		
				1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		laporan	12	1.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	36	46.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	36	460.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		laporan	12	23.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	36	78.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		laporan	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	36	1.050.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	900.000.000		
				1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		unit	73	200.000.000	73	200.000.000	73	200.000.000	73	600.000.000	DINSOS	DINSOS
				1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	DINSOS	DINSOS
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan																					
		Meningkatkan perlindungan sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesjahteraan Sosial (PPKS)									%	70	7.255.000.000	71	7.370.250.000	72	7.707.762.500	72	22.333.012.500		
				1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi jumlah PSKS dibagi 100	%	100	70.000.000	100	73.500.000	100	77.175.000	100	220.675.000		

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	%	100	70.000.000	100	73.500.000	100	77.175.000	100	220.675.000		
				1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		sertifikat	3	70.000.000	0	0	0	0	3	70.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS
				1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat		orang	0	0	199	73.500.000	199	77.175.000	199	150.675.000	Kab. Karanganyar	DINSOS
				1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	Jumlah Disabilitas yang Terlayani dibagi Jumlah Target Pelayanan Disabilitas dikali 100	%	100	1.530.000.000	100	1.550.000.000	100	1.596.500.000	100	4.676.500.000		
								Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti		Jumlah Anak Terlantar yang Terlayani dibagi Jumlah Target Pelayanan Anak Terlantar dikali 100	%	100		100		100		100				
								Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti		Jumlah Lansia yang Terlayani dibagi Jumlah Pelayanan Lansia dikali 100	%	100		100		100		100				
								Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti		Jumlah PGOT yang Terlayani dibagi Jumlah Target Pelayanan PGOT dikali 100	%	100		100		100		100				
				1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT	Persentase Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT	%	100	1.180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	1.540.000.000		
				1	06	04	2.01	01	Penyediaan Perumahan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perumahan sesuai dengan standar gizi minimal		orang	0	0	200	40.000.000	200	40.000.000	400	80.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1	06	04	2.02	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun		orang	0	0	200	40.000.000	200	40.000.000	400	80.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS
				1	06	04	2.03	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan		orang	0	0	200	100.000.000	200	100.000.000	400	200.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS
				1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		orang	120	230.000.000	0	0	0	0	120	230.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS
				1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat		orang	200	950.000.000	0	0	0	0	200	950.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS
				1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tertanganinya Penyandang Disabilitas dan Eks Penyandang Penyakit Kronis	Persentase Tertanganinya Penyandang Disabilitas dan Eks Penyandang Penyakit Kronis	%	100	350.000.000	100	1.370.000.000	100	1.416.500.000	100	3.136.500.000		
				1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan		orang	50	100.000.000	50	120.000.000	50	125.000.000	150	345.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS
				1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan SAPZA		orang	200	250.000.000	500	800.000.000	500	836.500.000	500	1.886.500.000	Kab. Karanganyar	DINSOS
				1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Katru Identitas Anak	Jumlah orang yang membutuhkan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan atau identitas anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS		orang	0	0	20	20.000.000	20	25.000.000	40	45.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
														10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesejatan dasar	orang	0	0	200	100.000.000	200	100.000.000	400	200.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS		
				1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	orang	0	0	200	100.000.000	200	100.000.000	400	200.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS		
				1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan	orang	0	0	120	230.000.000	120	230.000.000	240	460.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS		
				1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah KK miskin yang terbantu dibagi jumlah target pelayanan KK miskin dikali 100	%	100	5.420.000.000	100	5.500.000.000	100	5.775.000.000	100	16.695.000.000			
				1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran	Persentase Penyaluran Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran	%	100	5.420.000.000	100	5.500.000.000	100	5.775.000.000	100	16.695.000.000			
				1	06	05	2.02	01	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	orang	0	0	400.000	1.260.000.000	400.000	1.425.000.000	400.000	2.685.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS		
				1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	keluarga	500	1.184.000.000	0	0	0	500	1.184.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS			
				1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	keluarga	2100	4.200.000.000	1	4.200.000.000	1	4.300.000.000	2102	12.700.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS		
				1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	orang	50	36.000.000	50	40.000.000	50	50.000.000	50	126.000.000	Kab. Karanganyar	DINSOS		
				1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah KK korban bencana alam dan sosial yang terbantu dibagi Jumlah target SPM korban bencana alam dan sosial dikali 100	%	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	630.500.000			
				1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	%	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	630.500.000			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	orang	150	200.000.000	150	210.000.000	150	220.500.000	450	630.500.000	Kab. Karanganyar	DINSOS	
				1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana TMP dibagi target pemenuhan sarana dan prasarana TMP dikali 100	%	100	35.000.000	100	36.750.000	100	38.587.500	100	110.337.500		
				1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	35.000.000	100	36.750.000	100	38.587.500	100	110.337.500		
				1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota		1	maka m	35.000.000	1	36.750.000	1	38.587.500	1	110.337.500	Kab. Karanganyar	DINSOS

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 merupakan indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah hingga pada akhir tahun 2026. Target ini merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dikemukakan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

## Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
						Perkiraan Capaian Tahun 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
6	Dinas Sosial										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Indeks Reformasi Birokrasi			Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	0	80	0	0	0	0
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	74,44	79,44	81	82	83	83
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
	Angka Kemiskinan			Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	%	0	8,96	0	0	0	0
		Meningkatkan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani di tahun n dibagi jumlah seluruh PMKS tahun n dikali 100%	%	2,17	2,5	70	71	72	72

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Indikator Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
						Perkiraan Capaian Tahun 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
			Persentase cakupan pelayanan SPM	Capaian pelayanan SPM tahun n dibagi target pelayanan SPM tahun n dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Karanganyar Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Target Kinerja tahun		
				2024	2025	2026
	<b>Urusan Bidang Sosial</b>					
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100%	%			
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah di Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah di Kabupaten dikali 100%	%			

Tabel 7.3  
Indikator Program

NO	URUSAN/PROGRAM	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Perkiraan Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Target Tahun Periode RPD (2024-2026)			Target Akhir RPD	
							2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD, kali 100	%	100	100	100	100	100	100	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi jumlah PSKS dibagi 100	%	100	100	100	100	100	100	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah disabilitas yang terlayani dibagi jumlah target pelayanan disabilitas dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terlayani dibagi jumlah target pelayanan anak terlantar dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Lanisa yang terlayani dibagi jumlah target pelayanan lansia dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah PGOT yang terlayani dibagi Jumlah target pelayanan PGOT dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah KK miskin yang terbantu dibagi jumlah target pelayanan KK miskin dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	

NO	URUSAN/PROGRAM	Indikator Program	Formulasi	Satuan	Perkiraan Capaian Tahun 2022	Target Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Target Tahun Periode RPD (2024-2026)			Target Akhir RPD
							2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah KK korban bencana alam dan sosial yang terbantu dibagi Jumlah target SPM korban bencana alam dan sosial dikali 100	%	100	100	100	100	100	100
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana TMP dibagi target pemenuhan sarana dan prasarana TMP dikali 100	%	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2024 – 2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024 – 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2024 – 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

